



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN KEUANGAN 2025



(0287)381051



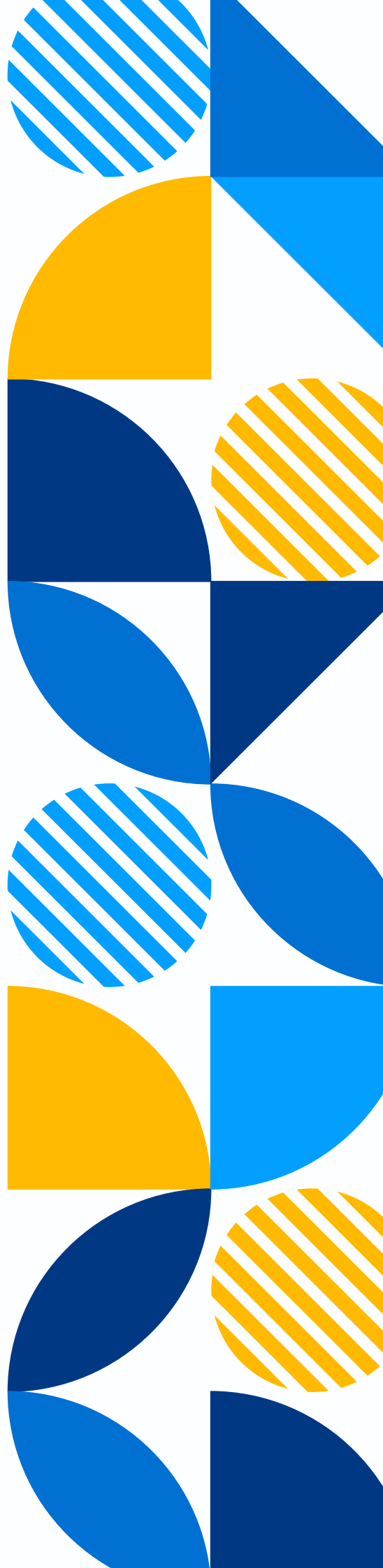
bpkpd.kebumenkab.go.id



bpkpd@kebumenkab.go.id



[bpkpd_kebumen](https://www.instagram.com/bpkpd_kebumen)





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 6);

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

- | | |
|---------|--|
| Bab I | Pendahuluan |
| | 1.1 Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD |
| | 1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD |
| | 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD |
| Bab II | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD |
| | 2.1 Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD |
| | 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| Bab III | Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD |
| | 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD: |
| | 3.1.1 Laporan Realisasi Anggaran |
| | 3.1.2 Laporan Operasional |
| | 3.1.3 Neraca |
| | 3.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas |
| | 3.1.5 Catatan Atas Laporan Keuangan |
| | 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual. |
| Bab IV | Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan |
| Bab V | Penutup |



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a. Pendapatan

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2025 sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai sebesar Rp.236.310.130.285 atau 96,96% dari target pendapatan sebesar Rp.243.718.784.422 dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp149.450.363.141 naik sebesar Rp86.859.767.144 atau sekitar 58,12%. Kenaikan pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2025 ini karena adanya pungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2025 yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	243.718.784.422	236.310.130.285	-7.408.654.137	96,96	149.450.363.141
1.	Pendapatan Pajak Daerah	232.526.294.000	222.396.578.469	-10.129.715.531	95,64	139.434.789.479
2.	Retribusi Daerah	271.000.000	324.467.697	53.467.697	119,73	288.420.788
3.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.921.490.422	13.589.084.119	2.667.593.697	124,43	9.727.152.874

Selain pendapatan asli daerah tersebut juga ada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, Pendapatan transfer dari pemerintah pusat yaitu insentif fiskal dengan anggaran sebesar Rp24.263.191.000 dan terealisasi 99,83% atau sebesar Rp24.222.868.000, lebih besar Rp3.373.406.000 dari pendapatan tahun 2024 dengan persentase kenaikan sebesar 16,18%.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen ditampilkan pada tabel berikut:

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)			
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	24.263.191.000	24.222.868.000	-40.323.000	99,83%	20.849.462.000
	Insentif Fiskal	24.263.191.000	24.222.868.000	-40.323.000	99,83%	20.849.462.000

b. Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 25.679.700.459 dan anggaran sebesar Rp. 27.965.519.467 atau mencapai 91,83% dengan rincian belanja operasi terealisasi Rp.25.306.284.509(91,77%) dari anggaran sebesar Rp27.576.483.002, sementara untuk Belanja Modal dari anggaran Rp389.036.465 terealisasi sebesar Rp373.415.950(95,98%).

1. Realisasi Belanja Per Akun

Rincian realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI T.A. 2025	
		Rp	%
BELANJA	27.965.519.467	25.679.700.459	91,83
BELANJA OPERASI	27.576.483.002	25.306.284.509	91,77
1. Belanja Pegawai	17.999.339.290	16.126.728.173	89,60
2. Belanja Barang dan Jasa	5.875.949.000	5.345.011.138	95,85
BELANJA MODAL	389.036.465	373.415.950	95,98
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	389.036.465	373.415.950	95,98
2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-

2. Realisasi Belanja Per Sub Kegiatan

KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Rp	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.368.000	51.173.026	94,12%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.758.000	35.852.726	92,50%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.610.000	15.320.300	98,14%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.094.326.370	16.209.475.387	89,58%

KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Rp	%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.999.339.290	16.126.728.173	89,60%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94.987.080	82.747.214	87,11%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.200.000	11.187.000	99,88%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.200.000	11.187.000	99,88%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.700.000	328.466.847	97,27%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	8.923.500	99,15%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.000.000	111.527.450	98,70%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000	24.920.600	92,30%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	3.485.000	99,57%
Penyediaan Bahan/Material	47.200.000	42.553.800	90,16%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.000.000	137.056.497	99,32%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	398.765.465	382.462.450	95,91%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.765.465	76.890.000	87,61%
Pengadaan Mebel	33.000.000	31.287.000	94,81%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	278.000.000	274.285.450	98,66%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.746.000	483.223.692	94,98%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	2.833.040	80,94%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265.000.000	248.527.122	93,78%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.246.000	231.863.530	96,51%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	717.409.552	691.156.185	96,34%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.193.552	229.240.635	98,73%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.216.000	54.510.350	83,58%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	420.000.000	407.405.200	97%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.368.000	51.173.026	94,12%

KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Rp	%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	805.205.900	748.133.644	92,91%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	151.563.900	150.222.800	99,12%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	253.952.000	229.241.480	90,27%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	245.741.000	230.472.640	93,79%
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	112.632.000	104.715.424	92,97%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	41.317.000	33.481.300	81,04%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	412.065.000	382.821.989	92,90%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	130.269.000	125.889.060	96,64%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	77.659.000	71.970.079	92,67%
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	64.645.000	55.566.800	85,96%
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	139.492.000	129.396.050	92,76%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	287.848.530	274.402.544	95,33%
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	59.630.000	59.340.200	99,51%
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	41.790.350	40.928.333	97,94%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	85.500.000	82.344.472	96,31%

KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Rp	%
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	91.185.000	83.425.539	91,49%
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	9.743.180	8.364.000	85,84%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	689.811.736.600	656.408.045.168	95,16%
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	661.051.892.600	638.765.615.500	96,63%
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	11.800.000.000	1.035.914.118	8,78%
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	16.959.844.000	16.606.515.550	97,92%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	884.293.090	823.602.842	93,14%
Penyusunan Standar Harga	84.120.000	67.724.500	80,51%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	70.033.000	64.371.584	91,92%
Penatausahaan Barang Milik Daerah	79.102.000	77.720.800	98,25%
Pengamanan Barang Milik Daerah	357.832.400	351.725.150	98,29%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	116.925.690	99.674.100	85,25%
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	61.290.000	59.010.216	96,28%
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	63.295.000	60.645.192	95,81%
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	51.695.000	42.731.300	82,66%
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.304.829.960	5.152.019.965	97,12%
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.051.882.000	1.015.309.110	96,52%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	85.209.000	83.681.458	98,21%
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	113.978.000	107.424.379	94,25%
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	86.650.360	86.219.382	99,50%
Penetapan Wajib Pajak Daerah	380.759.000	347.298.256	91,21%
Penagihan Pajak Daerah	3.586.351.600	3.512.087.380	97,93%
JUMLAH	717.628.494.467	681.946.170.739	95,03

B. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran 2025 belum maksimal karena disebabkan beberapa faktor eksternal dalam mencapai target pendapatan dan belanja.

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pada realisasi pendapatan pajak daerah belum bisa tercapai 100% karena adanya target objek pendapatan pajak yang baru dikelola pada tahun anggaran 2025 yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB, dimana untuk mencapai target BPKPD Kabupaten Kebumen harus bersinergi bersama UPPD BAPENDA Jawa Tengah Kabupaten Kebumen. Upaya yang dilakukan untuk tercapainya target pendapatan opsen ini BPKPD Kebumen dan BAPENDA Jawa Tengah sudah melakukan sosialisasi bersama melalui kanal youtube BPKPD Kabupaten Kebumen dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen selama tahun 2025, selain itu penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan juga dilakukan untuk memacu realisasi Opsen PKB dan BBNKB ini.

Pendapatan pajak reklame juga menjadi salah satu objek pajak yang tidak tercapai dengan persentase realisasi sebesar 92,33%. Tidak tercapainya target pendapatan pajak reklame ini karena beberapa objek pajak reklame tidak memperpanjang pemasangan reklame.

Pendapatan pajak air tanah juga belum mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun jumlah realisasi pendapatan sudah lebih besar dari realisasi tahun sebelumnya. Pajak air tanah tidak mencapai target karena faktor banyaknya wajib pajak tidak lagi menggunakan sumber air dari sumur tetapi melalui sumber lain (PDAM).

Pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2025 ini hanya tercapai 52,63% menjadi capaian objek pajak daerah terendah dibandingkan objek pajak lain, hal ini terjadi karena pemungutan

hanya dari tambang yang ber ijin, dan tidak semua tambang yang berijin melakukan produksi;

Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) masing-masing hanya tercapai 85,68% dan 82,76%. Tidak tercapainya target pendapatan opsen PKB dan BBNKB ini karena beberapa faktor eksternal. Fluktuasi ekonomi dan kemampuan masyarakat membayar pajak menjadi salah satu tantangan utama. Ketika ekonomi melambat atau pendapatan warga turun, kepatuhan bayar pajak cenderung lebih rendah sehingga realisasi di bawah target. Perhitungan target yang belum akurat juga menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen belum memiliki data potensi kendaraan sebagai dasar perhitungan Target Pajak Opsen PKB dan BBNKB. Kemudian optimalisasi dengan berbagai program (penagihan door-to-door, sosialisasi, layanan pembayaran perluasan), dampaknya baru terlihat sebagian. Faktor kesadaran masyarakat, dan efektifitas penagihan masih menjadi tantangan yang perlu ditingkatkan agar target terpenuhi. Dan yang terakhir Kebijakan Pemerintah Provinsi memberikan diskon dan pemutihan pajak PKB berdampak pada peningkatan kepatuhan bayar pajak, menarik wajib pajak untuk membayar lebih awal tetapi bisa menurunkan pajak yang dibayarkan per kendaraan. Pemutihan mengurangi beban bayar sehingga banyak pajak tertunggak terbayar, tetapi total penerimaan bisa lebih rendah dibanding target awal yang diasumsikan tanpa pemutihan.

Kemudian pada pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) meskipun keseluruhan realisasi pendapatannya melebihi 100% tetapi ada objek didalamnya yang masih belum terealisasi dan capaian nya masih di bawah 90%. Masing-masing adalah PBJT Jasa Parkir hanya terealisasi 84,72% karena adanya objek pajak parkir yg tidak membayar pajak parkir, hal ini disebabkan terbitnya surat edaran kementerian kehutanan ttg tidak diperbolehkan memungut pajak atau retribusi di kawasan hutan.

2. Belanja

Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen terealisasi 91,82% sebesar Rp25.679.700.459 dari anggaran belanja sebesar Rp27.965.519.467. meskipun realisasi belanja sudah diatas 90% namun ada beberapa kegiatan yang realisasinya kurang maksimal masih dibawah 90%. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan pagu anggaran sebesar Rp18.094.326.370 terealisasi sebesar Rp16.209.475.387 atau 89,58% dari target 100%, deviasi sebesar 10,42% menjadi salah satu kegiatan dengan deviasi yang tinggi, ini dikarenakan pada sub kegiatan gaji dan tunjangan rekening belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dan beberapa rekening Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang tidak dapat dibayarkan karena capaian beberapa pendapatan pajak daerah sampai dengan akhir tahun tidak memenuhi target sehingga berdampak pada realisasi pembayaran insentif untuk ASN dan KDH/WKDH, dan pada subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD rekening belanja iuran jaminan/asuransi bagi Non ASN tidak terbayarkan karena sebagian besar tenaga non asn dibayarkan oleh SKPD Kepegawaian Daerah sehingga ada deviasi yang cukup tinggi.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Secara keseluruhan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sudah terealisasi dengan baik sekitar 97, 27%, namun pada beberapa rekening belanja di sub kegiatan masih ada deviasi yang cukup tinggi, ini dikarenakan harga beli beberapa barang ada selisih harga dengan standar harga daerah yang ditetapkan sehingga ada penghematan belanja dan menjadi silpa pada akhir periode.

c. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Pada kegiatan ini juga realisasi belanja secara keseluruhan sudah baik dengan persentase sebesar 92,91% dari pagu anggaran sebesar Rp805.205.900 dan realisasi belanja sebesar Rp748.133.644. Dari 5 Sub kegiatan, Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan realisasi 99,12% menjadi sub kegiatan dengan realisasi tertinggi, namun pada sub kegiatan lain deviasinya di atas 5% karena adanya efisiensi pada beberapa rekening belanja seperti bahan komputer, alat tulis kantor dan belanja kertas dan cover yang selisih harganya lebih rendah dari standar harga satuan daerah yang ditetapkan.

d. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Pagu anggaran kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah sebesar Rp412.065.000 pada akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp382.821.989 dengan persentase sebesar 92,90% ini sudah cukup baik namun sama seperti kegiatan sebelumnya juga ada deviasi karena selisih harga belanja dengan standar harga satuan daerah sehingga menjadi silpa. Selain itu juga belanja bahan bakar yang tidak dibelanjakan karena mengurangi belanja perjalanan dinas ke luar daerah sehingga anggaran perjalanan dinas dan bahan bakar minyak tidak terserap dan menjadikan deviasi kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah mencapai 7,10%.

e. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Pada kegiatan ini realisasi belanja sudah sangat baik dengan persentase realisasi sebesar 95,33% dari pagu sebesar Rp287.848.530 terealisasi Rp 274.402.544, dari realisasi belanja tersebut ada silpa dari beberapa rekening belanja karena selisih harga *real* dengan standar harga yang ditetapkan diantaranya belanja bahan komputer, alat tulis kantor dan belanja kertas /cover.

f. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan pagu anggaran Rp689.811.736.600 kegiatan ini merupakan kegiatan dengan pagu terbesar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, terdapat 3 anggaran belanja yaitu belanja operasi, belanja tak terduga dan belanja transfer. Persentase realisasi belanja sebesar 95,16% atau Rp656.408.045.168. Masing-masing anggaran dan realisasi belanjanya sebagai berikut:

1. Belanja Operasi dengan pagu Rp148.761.600 terealisasi 95,17% atau sebesar Rp141.574.888.
2. Belanja Tak Terduga dengan pagu Rp11.800.000.000 terealisasi hanya 8,78% atau sebesar Rp1.035.914.118, realisasi yang sangat rendah ini terjadi karena anggaran ini sifatnya insidental dan penyediaan yang akan dibelanjakan untuk kondisi tertentu, seperti untuk penanganan bencana atau kondisi darurat lainnya.
3. Belanja Transfer terealisasi 96,66% atau sebesar Rp655.230.556.162 dari pagu sebesar Rp677.862.975.000.

Belanja operasi pada kegiatan ini sudah cukup baik dengan persentase realisasi sebesar 95,17%. Adapun beberapa rekening belanja operasi yang realisasi belanjanya masih rendah adalah belanja alat tulis kantor, bahan komputer dan belanja kertas/cover karena selisih harga yang cukup besar dengan standar harga satuan daerah.

Dari beberapa Kegiatan yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen di atas diterangkan bahwa hampir setiap kegiatan realisasinya kurang maksimal karena ada rekening belanja bahan komputer, atk dan kertas cover selisih nya cukup banyak dibandingkan harga riil sehingga cukup banyak silpa pada akhir tahun. Harapannya untuk tahun anggaran berikutnya penyusunan standar harga yang ditetapkan pada item tersebut bisa dioptimalkan supaya tidak

menjadikan deviasi kembali. Kendala juga masih disebabkan sistem (SIPD) yang beberapa kali maintenance sehingga menyebabkan proses pengajuan belanja baik NPD maupun DPR KKPD sedikit terhambat. Sedangkan solusi atau upaya untuk mencapai target dan menangani hambatan-hambatan tersebut akan dilaksanakan dengan rencana tindak lanjut antara lain:

- Mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik SDM maupun anggaran yang tersedia;
- Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan pihak eksternal terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
- Koordinasi dengan Kemendagri terkait implementasi SIPD Penatausahaan yang masih cukup sering terjadi kendala karena pengguna masih menyesuaikan dalam menggunakan SIPD Penatausahaan dan juga sistem yang masih terus dilakukan *maintenance*.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

A. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan Asli Daerah - LRA

Jumlah target pendapatan asli daerah tahun 2025 sebesar Rp243.718.784.422 Terealisasikan sebesar Rp236.310.130.285 atau 96,96% dari target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

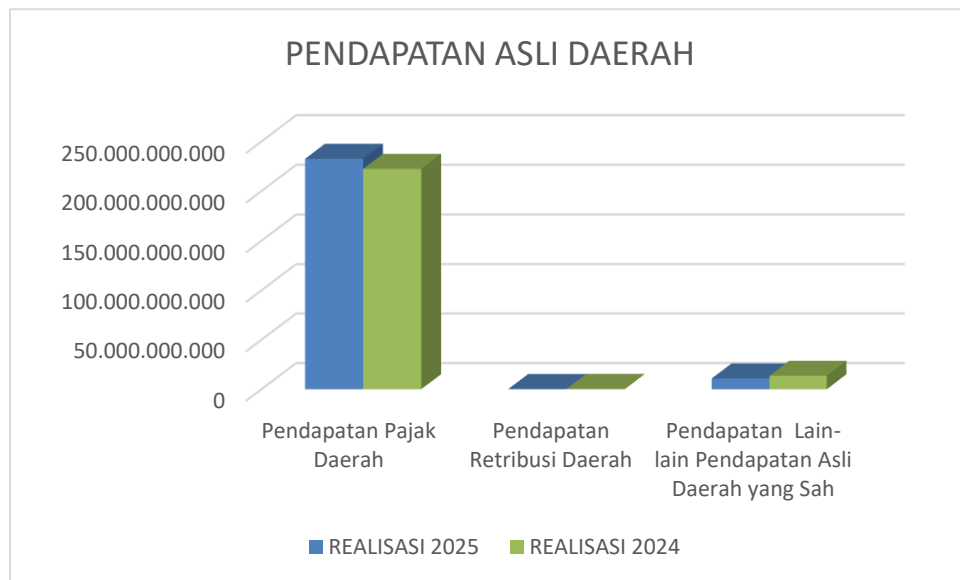
Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	*) Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	243.718.784.422	236.310.130.285	-7.408.654.137	96,96	149.450.363.141

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 ini tercapai sebesar 96,96% atau sebesar Rp236.310.130.285, capaian target pendapatan tersebut lebih besar dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp243.718.784.422. jumlah realisasi tersebut lebih besar jika di bandingkan tahun 2024 yang hanya tercapai sebesar Rp149.450.363.141. jumlah realisasi pendapatan yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya ini mengikuti target pendapatan yang bertambah dengan adanya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang pada tahun 2025 ini menjadi pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sehingga terdapat kenaikan pendapatan pajak asli daerah sebesar 58,12% atau Rp 86.859.767.144 dari capaian pendapatan tahun sebelumnya.

Secara lebih rinci pendapatan asli daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025 ini dijelaskan pada tabel berikut:

Pendapatan Asli Daerah	2025		%	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Pajak Daerah	232.526.294.000	222.396.578.469	95,64	139.432.389.479
Pendapatan Retribusi Daerah	271.000.000	324.467.697	119,73	288.420.788
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.921.490.422	13.589.084.119	124,42	9.729.552.874
Jumlah	243.718.784.422	236.310.130.285	96,96	149.450.363.141

Grafik realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2024 dan tahun 2025 ditampilkan pada grafik berikut:



1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp232.526.294.000 terealisasi sebesar Rp222.396.578.469 dengan persentase 95,64% terdiri dari 8 jenis pajak yaitu pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral buka logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Rincian target dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Pendapatan Pajak Daerah	2025		%	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Pajak Daerah	232.526.294.000	222.396.578.469	95,64	139.432.389.479
Pajak Hotel	0	0	0	2.728.082.330
Pajak Restoran	0	0	0	14.038.805.792
Pajak Hiburan	0	0	0	1.096.652.834
Pajak Reklame	2.200.000.000	2.031.235.407	92,32	1.792.719.928
Pajak Penerangan Jalan	0	0	0	46.640.474.661
Pajak Parkir	0	0	0	536.819.441
Pajak Air Tanah	450.000.000	433.616.200	96,35	398.343.480
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000	789.542.020	52,63	625.161.762
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	57.500.000.000	58.319.093.106	101,42	58.136.414.662
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000.000	16.752.370.265	128,86	13.100.845.920
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	62.850.000.000	63.494.957.899	101,02	0
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	66.000.000.000	56.553.587.072	85,68	338.068.669
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	29.026.294.000	24.022.176.500	82,76	0

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 pendapatan pajak daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen ada 8 jenis pajak daerah. Berbeda dengan tahun sebelumnya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah mengelola 10 jenis pajak daerah dikarenakan beberapa jenis pajak seperti pajak, hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan dan parkir pada tahun 2025 ini menjadi 1 jenis pajak yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu sesuai Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Disamping itu pada tahun anggaran 2025 ini terdapat penambahan 2 (dua) target pendapatan pajak daerah yaitu Opsen Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Selain pendapatan pajak daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah juga mengelola pendapatan retribusi daerah. Tahun 2025 target pendapatan retribusi daerah sebesar Rp271.000.000 terealisasi sebesar Rp324.467.697 atau 119,73%. Hal ini bisa dilihat pada table berikut:

Retribusi	Tahun 2025		%	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	271.000.000	324.467.697	119,72	288.420.788
- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	271.000.000	324.467.697	119,72	288.420.788
Jumlah	271.000.000	324.467.697	119,72	283.648.416

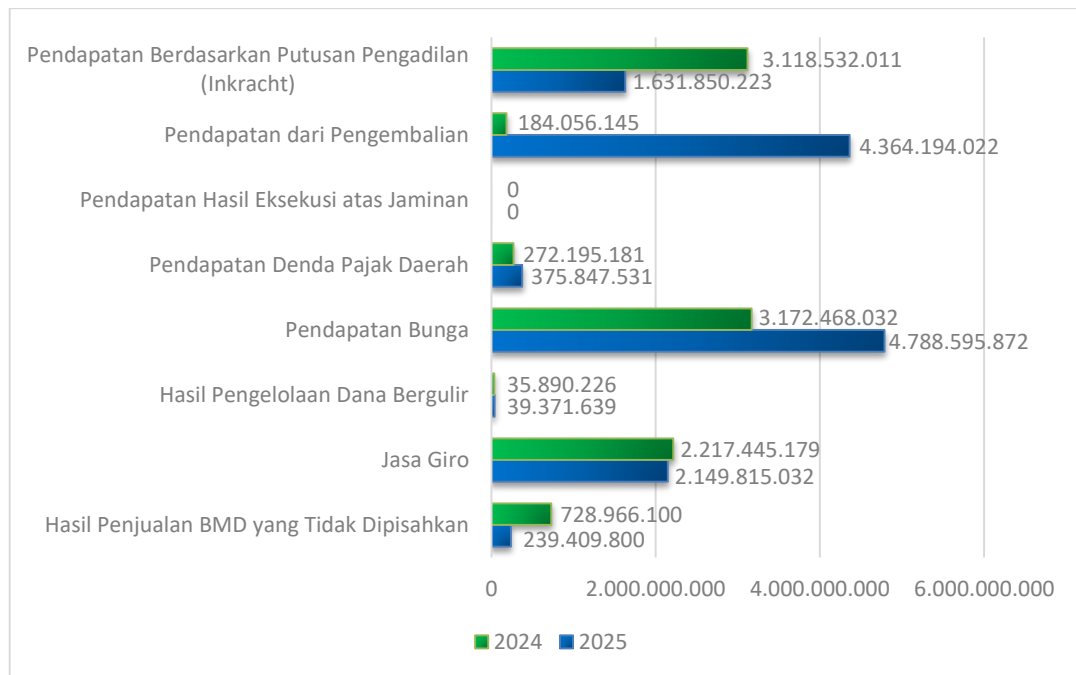
Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi Rp.324.467.697 atau sebesar 119,72% merupakan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari penyewaan tanah dan bangunan, dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun anggaran 2025 ini jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya ada kenaikan sebesar 12,50% dibandingkan realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar tahun 2024 sebesar Rp288.420.788.

1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2025 capaiannya melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 124,43% dari target, hal ini tentunya menjadi sesuatu yang positif dan harus menjadi *motivasi* untuk pencapaian target pendapatan kedepan. Tahun anggaran 2025 target Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp10.921.490.422 dan terealisasi sebesar Rp13.589.084.119. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disajikan pada tabel berikut:

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	310.000.000	239.409.800	77,22	728.966.100
Jasa Giro	1.800.000.000	2.149.815.032	119,43	2.217.445.179
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	37.500.000	39.371.639	104,99	35.890.226
Pendapatan Bunga	2.400.000.000	4.788.595.872	199,52	3.172.468.032
Pendapatan Denda Pajak Daerah	344.601.920	375.847.531	109,06	272.195.181
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	18.500.000	0	0	0
Pendapatan dari Pengembalian	4.282.740.502	4.364.194.022	101,90	184.056.145
Jumlah	10.921.490.422	13.589.084.119	124,42	9.729.552.874

Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran 2025 naik sebesar 20,39% dibandingkan realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah tahun yang lalu. Realisasi pada tahun 2024 hanya Rp9.729.552.874, sementara untuk realisasi dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2025 mencapai Rp13.589.084.119 di akhir tahun anggaran, dimana persentase realisasi paling tinggi adalah pendapatan bunga sebesar 199,52% hampir mencapai dua kali lipat dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.400.000.000 tercapai Rp4.788.595.872. namun dari beberapa pendapatan yang realisasinya melampaui target tersebut ada satu pendapatan yang realisasi nya cukup rendah yaitu pendapatan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan yang didalamnya merupakan penjualan kendaraan bermotor dan alat kantor lainnya sebesar Rp375.847.531 atau 77,23% dari target sebesar Rp344.601.920, hal ini perlu diperhatikan faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga kedepan dapat teratasi dan target bisa tercapai. Grafik realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut:



Grafik perbandingan realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024 dan 2025

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan, Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tahun 2025 dengan target sebesar Rp1.853.886.530.438 tercapai Rp1.901.630.829.729 secara persentase sebesar 102,57%. Rincian capaian pendapatan transfer dapat dilihat pada table berikut:

Pendapatan Transfer	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran	Realisasi		
Dana Perimbangan	0	0	0,00	172.670.763.638
Insentif Fiskal	24.263.191.000	24.222.868.000	99,83	20.849.462.000
Dana Bagi Hasil (DBH)	38.116.461.000	36.911.825.200	96,83	0
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.272.048.621.000	1.322.224.058.321	103,94	0
Dana Alokasi Khusus (DAK)	519.458.257.438	518.272.078.208	99,77	0
JUMLAH	1.853.886.530.438	1.901.630.829.729	102,57	193.520.225.638

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan hibah ke daerah dari pemerintah pusat, namun pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak mendapatkan hibah dari pemerintah pusat karena kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dimana anggaran tersebut akan di alihkan untuk prioritas lain. Rincian Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada table berikut:

URAIAN	2025		%	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0	0	0	18.563.009.000

4. Belanja - LRA

Realisasi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp25.679.700.459 atau 91,82% dari anggaran sebesar Rp27.965.519.467 Rincian Anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2025 tersaji sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	2025			Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
BELANJA				
Belanja Operasi				
1. Belanja Pegawai	17.999.339.290	16.126.728.173	89,59	13.427.923.154
2. Belanja Barang dan Jasa	9.577.143.712	9.179.556.336	95,84	10.086.580.093
3. Belanja Subsidi	0	0	0	0
Jumlah Belanja Operasi	27.576.483.002	25.306.284.509	91,76	23.514.503.247
Belanja Modal				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	389.036.465	373.415.950	95,98	6.876.656.439
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0	-
Jumlah Belanja Modal	389.036.465	373.415.950	95,98	6.876.656.439
Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0
Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0
Jumlah Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0
Belanja Transfer				
Belanja Bagi Hasil	0			
Belanja Bantuan Keuangan	0			
Belanja Transfer				
JUMLAH BELANJA	27.965.519.467	25.679.700.459	91,82	30.391.159.686

Berdasarkan Tabel diatas Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.711.459.227 atau 94,57%, hal ini terjadi karena anggaran belanja modal tahun anggaran 2025 turun signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2024 masih ada anggaran belanja modal kendaraan dinas sehingga berdampak pada jumlah realisasi belanjanya, namun meskipun jika dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan realisasi tahun ini persentase nya cukup baik dengan capaian 95,95%. Realisasi belanja operasi mengalami kenaikan disbanding tahun anggaran 2024 sebesar 7,62% dari tahun sebelumnya. Secara umum realisasi belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2025 ini lebih kecil jika dibanding realisasi tahun 2024, ini berbanding lurus dengan berkurangnya anggaran belanja dari tahun sebelumnya. Pada rincian belanja pegawai realisasi nya cukup rendah dibawah 90% akibat anggaran belanja insentif pemungutan pajak daerah yang tidak dicairkan karena beberapa target pendapatan yang tidak tercapai dan juga adanya pegawai yang purna tugas sehingga insentif tidak bisa dibayarkan dan mejadi silpa.

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 cukup baik mencapai 91,77% atau sebesar Rp.25.306.284.509 dari anggaran sebesar Rp.27.576.483.002 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp.23.514.503.247 naik cukup besar yaitu sebesar 7,62% sebagaimana data yang ditampilkan pada tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 diatas. Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa.

Adapun rincian realisasi atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa tahun anggaran 2025 tersaji dalam tabel berikut:

BELANJA OPERASI	2025		%	REALISASI TAHUN 2024
	ANGGARAN	REALISASI		
BELANJA PEGAWAI	17.999.339.290	16.126.728.173	89,59	13.427.923.154
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.875.949.000	5.345.011.138	90,96	5.324.598.944
Belanja Gaji Pokok ASN	4.231.866.549	4.021.851.029	95,03	3.998.912.633
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	400.000.000	374.055.009	93,51	408.969.016

BELANJA OPERASI	2025		%	REALISASI TAHUN 2024
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	238.000.000	214.270.000	90,02	235.410.000
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	140.000.000	130.275.000	93,05	125.665.000
Belanja Tunjangan Beras ASN	249.580.000	205.165.860	82,20	214.145.940
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	139.500.000	69.882.776	50,09	8.409.118
Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.000.000	49.834	2,49	48.715
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	391.002.451	296.091.943	75,72	300.190.962
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	31.500.000	8.342.413	26,48	8.211.821
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	52.500.000	25.027.274	47,67	24.635.739
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.549.249.290	10.254.610.793	88,79	4.027.901.864
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.105.720.000	3.939.315.603	95,94	4.027.901.864
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.105.720.000	3.939.315.603	95,94	0
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	574.141.000	527.106.242	91,80	296.700.786
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	574.141.000	527.106.242	91,80	296.700.786
BELANJA BARANG DAN JASA	9.577.143.712	9.179.556.336	95,84	10.086.580.093
Belanja Barang	4.372.349.490	4.100.748.220	93,78	3.145.289.692
Belanja Barang Pakai Habis	4.261.035.240	4.007.121.720	94,04	3.117.916.692
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	111.314.250	93.626.500	84,11	27.373.000
Belanja Jasa	4.291.654.532	4.181.304.975	97,42	5.665.799.437
Belanja Jasa Kantor	3.988.052.552	3.905.910.762	97,94	5.360.091.572
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.758.480	16.935.639	71,28	35.978.065
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	84.545.500	84.241.500	99,64	118.884.000
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	70.100.000	49.247.724	70,25	73.945.000
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	125.198.000	124.969.350	99,81	76.900.800
Belanja Pemeliharaan	436.875.000	429.661.872	98,34	199.897.700
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.000.000	67.307.672	93,48	55.386.800
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	364.875.000	362.354.200	99,30	144.510.900

BELANJA OPERASI	2025		%	REALISASI TAHUN 2024
	ANGGARAN	REALISASI		
Belanja Perjalanan Dinas	476.264.690	467.841.269	98,23	963.393.264
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	476.264.690	467.841.269	98,23	963.393.264

b) Belanja Modal

Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025 turun signifikan dari jumlah anggaran yang ditetapkan jika dibandingkan belanja modal tahun sebelumnya karena tidak adanya belanja modal peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas. Tentunya hal ini juga berbanding lurus dengan penurunan jumlah realisasi anggaran belanja modal. Meskipun begitu dari sisi persentase realisasi belanja modal tahun 2025 cukup baik yaitu sebesar 95,98%. Rincian belanja modal sebagai berikut:

Belanja Modal	2025		%	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Tanah	0	0	0	0
Belanja Peralatan dan Mesin	389.036.465	373.415.950	95,98	6.876.656.439
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Aset tetap Lainnya	0	0	0	0
Belanja Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
Jumlah	389.036.465	373.415.950	95,98	6.876.656.439

Belanja modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen berupa belanja peralatan dan mesin, realisasi belanja modal tahun 2025 cukup baik dengan persentase 95,98% atau sebesar Rp.373.415.950 adalah belanja kendaraan roda dua untuk hadiah pelunasan PBB kecamatan kemudian untuk belanja peralatan dan mesin adalah belanja personal komputer/laptop dan juga belanja peralatan video audio untuk menunjang program podcast sebagai sarana untuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai keuangan dan pendapatan daerah.

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	2025		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Alat Angkutan	87.765.465	76.890.000	87,60
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	83.409.927	81.270.855	97,43
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	48.039.500	47.850.990	99,60
Belanja Modal Komputer	169.821.573	167.404.105	98,57
Jumlah	389.036.465	373.415.950	95,98

B. Laporan Operasional

1. Pendapatan – LO

Pendapatan pada laporan operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terdapat 2 (dua) rincian pendapatan yaitu pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah dengan jumlah pendapatan sebesar Rp272.466.079.605,69 dapat dilihat realisasi secara rinci pada tabel berikut:

Realisasi Pendapatan – LO

No	Pendapatan – LO	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	PAD – LO	260.764.079.605,69	180.236.673.387,90	80.314.394.774,90	44,68
2	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	11.702.000.000,00	18.563.009.000,00	(18.563.009.000,00)	(36,96)
Jumlah		272.466.079.605,69	198.799.682.387,90	61.751.385.774,90	37,06

Tabel realisasi pendapatan LO tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan LO tahun 2025 lebih besar dibandingkan realisasi pada tahun 2024 dengan persentase kenaikan 37,06%. Kenaikan cukup signifikan pada pendapatan asli daerah ini karena didalamnya ada penambahan rincian pendapatan opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah

untuk tahun 2025 ini sebesar Rp11.702.000.000,- merupakan hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

2. Beban - LO

Beban-LO Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp22.406.773.154,11 lebih kecil dari Beban tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
	BEBAN				
1	Beban Operasi	22.406.773.154,11	26.973.724.796,05	(4.566.951.641,94)	(16,93)
	Total Beban	22.406.773.154,11	26.973.724.796,05	(4.566.951.641,94)	(16,93)

Tabel diatas menunjukkan beban LO Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen mengalami penurunan sebesar 11,65% atau Rp4.566.951.641,94.

a. Beban Operasi

Beban Operasi tahun 2025 sebesar Rp22.406.773.154,11 terdiri dari:

Realisasi Beban Operasi

No	Beban	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	15.813.511.520,00	13.413.971.140,00	17,89
2	Beban Barang dan Jasa	8.109.999.630,53	9.827.855.260,20	(17,48)
3	Beban Hibah	0,00	398.443.500,00	(100,00)
4	Beban Penyisihan Piutang	0,00	1.719.778.152,85	(100,00)
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	1.613.676.743,00	(100,00)
	Jumlah	22.406.773.154,11	26.973.724.796,05	(16,93)

1. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2025 sebesar Rp15.813.511.520,00

Rincian Beban Barang dan Jasa

No	Jenis Beban	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.345.011.138,00	13.413.971.140,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	9.941.394.140,00	4.013.949.850,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	3.778.721.560,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	527.106.242,00	296.700.786,00
	Jumlah	15.813.511.520,00	13.413.971.140,00

2. Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Barang dan Jasa pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp8.109.999.630,53

Rincian Beban Barang dan Jasa

No	Jenis Beban	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Barang	3.390.398.603,51	3.136.374.595,13
2	Beban Jasa	4.184.452.086,02	5.679.944.101,07
3	Beban Pemeliharaan	67.307.672,00	55.386.800,00
4	Beban Perjalanan Dinas	467.841.269,00	963.393.264,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	(7.243.500,00)
	Jumlah	8.109.999.630,53	9.827.855.260,20

3. Beban Hibah

Beban Hibah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2025 adalah Rp0

4. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan piutang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah (Rp1.516.737.996,42).

Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Jenis Beban	2025 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(981.956.482,70)	1.074.427.462,13
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	136.064.250,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(534.781.513,72)	509.286.440,72
	Jumlah	(1.516.737.996,42)	1.719.778.152,85

5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2025 sebesar Rp.0 merupakan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset lainnya berupa beban penyusutan peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	Jenis Beban	2025 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	887.628.849,00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	687.304.568,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	18.809.826,00
4.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	19.933.500,00
	Jumlah	0,00	1.613.676.743,00

3. Surplus/defisit – LO

Surplus defisit – LO untuk tahun 2025 sebesar Rp250.059.306.451,58 atau naik sebesar Rp78.233.348.859,73 dibandingkan tahun sebelumnya.

C. Neraca

1. Aset

a. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp296.654.176.742,51 dan Rp10.342.865.005,06. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Badan Pengelolaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	ASET LANCAR	2025	2024
1	Kas dan Setara Kas	283.887.363.000,00	-
2	Piutang Pajak Daerah	13.024.009.445,00	12.513.421.142,00
3	Piutang Retribusi Daerah	136.064.250,00	136.064.250,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.218.799.472,00	4.504.308.415,00
5	Penyisihan Piutang	-5.393.677.328,00	-6.919.832.824,00
6	Beban Dibayar Dimuka	15.395.723,02	17.535.470,04
7	Persediaan	766.222.180,49	91.368.552,00
	JUMLAH	296.654.176.742,51	10.342.865.005,06

1) Kas dan Setara Kas

Pada akhir tahun anggaran 2025 kas dan setara kas badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kabupaten kebumen sebesar Rp283.887.363.000. Nilai kas dan setara kas tersebut merupakan pengakuan atas pendapatan TPG yang ada di BPKPD selaku PPKD, sementara belanja nya berada di Dinas Pendidikan

2) Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang per 31 Desember 2025 disajikan bruto sebelum dikurangi penyisihan piutang yang disajikan terpisah pada akun Penyisihan Piutang. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Saldo Piutang pajak daerah sebesar Rp13.024.009.445,00 terdiri dari:

Piutang Pajak	Tahun 2025	Tahun 2024 (Audited)
	(Rp)	(Rp)
Piutang Pajak Hotel	-	2.790.000,00
Piutang Pajak Restoran	-	13.017.215,00
Piutang Pajak Hiburan	-	1.670.000,00
Piutang Pajak Reklame	120.321.291,00	167.438.941,00

Piutang Pajak	Tahun 2025	Tahun 2024 (Audited)
	(Rp)	(Rp)
Piutang Pajak Parkir	-	880.000,00
Piutang Pajak Air Tanah	3.635.622,00	9.005.922,00
Piutang Pajak MBLB	550.000,00	49.108.750,00
Piutang PBB-P2	12.836.104.917,00	12.229.729.814,00
Piutang BPHTB	39.780.500,00	39.780.500,00
Piutang PBJT	23.617.115,00	-
Saldo Piutang Pajak	13.024.009.445,00	12.513.421.142,00

3) Piutang Retribusi Daerah

Piutang retribusi daerah merupakan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah dari penyewaan tanah dan bangunan. Saldo tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebesar Rp136.064.250.

4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.722.329.247,00 disajikan bruto sebelum penyisihan piutang denda, Piutang Denda Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2025	Tahun 2024 (Audited)
	(Rp)	(Rp)
a. Piutang Jasa Giro	0,00	0,00
b. Piutang Pengelolaan Dana Bergulir	544.840.901,00	554.258.401,00
c. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.673.958.571,00	3.950.050.014,44
JUMLAH	4.218.799.472,00	4.504.308.415,44

Dari tabel rincian Piutang Lain-lain PAD yang sah diatas terdapat piutang denda pajak daerah sebesar Rp3.168.070.846,00 sebagaimana rincian yang ditampilkan dalam table berikut:

Piutang Denda Pajak	Tahun 2025	Tahun 2024 (Audited)
	(Rp)	(Rp)
a. Pajak Hotel	0	29.500,00
b. Pajak Restoran	0,00	2.704.608,20
c. Pajak Hiburan	0	21.500,00
d. Pajak Reklame	23.610.165,00	22.752.769,86
e Pajak Parkir	-	384.200,00
f. Pajak Air Tanah	746.199	1.081.015,88
g. Pajak MBLB	0,00	1.516.187,50
h. PBB-P2	3.642.940.749,00	3.919.118.708,00
i. BPHTB	3.435.185,00	2.441.525,00
j. PBJT	2.840.213	0,00
Saldo Piutang Denda Pajak	3.673.572.511	3.950.050.014,44

5) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar (Rp5.393.677.328,00) merupakan Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian pada tabel berikut:

Penyisihan Piutang	Tahun 2025	Tahun 2024 (Audited)
	(Rp)	(Rp)
- Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(3.248.828.688,00)	(4.230.785.170,70)
- Penyisihan Piutang Retribusi	(136.064.250,00)	(136.064.250,00)
- Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(2.008.784.390,00)	(2.552.983.403,72)
Penyisihan Piutang	(5.393.677.328,00)	(6.919.832.824,42)

6) Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka sebesar Rp15.395.723,02 merupakan piutang atas premi asuransi kendaraan bermotor, angka tersebut lebih kecil dibandingkan beban dibayar dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp.17.535.470,04.

7) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp766.222.180,49 dan Rp91.368.552.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo persediaan sebesar Rp766.222.180,49 merupakan saldo persediaan atas barang pakai habis yang belum habis/belum digunakan sampai dengan tanggal neraca.

No	Persediaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Audited) (Rp)
1.	Barang Pakai Habis	766.222.180,49	91.368.552,00
2.	Bahan/Material	0	0
3.	Barang Lainnya	0	0
Jumlah		766.222.180,49	91.368.552,00

b. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebesar Rp51.848.444.072,00 dan Rp38.517.223.640. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada Tabel berikut:

Rincian Aset Tetap

Aset Tetap	2025	2024
Tanah	24.289.186.800,00	12.430.641.800,00
Peralatan dan Mesin	18.045.746.942,00	17.160.156.621,00
Gedung dan Bangunan	35.692.489.032,00	34.370.954.771,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	760.978.268,00	760.978.268,00
Akumulasi Penyusutan	(26.589.423.770,00)	(26.578.923.770,00)
Jumlah Aset Tetap	52.198.977.272,00	38.143.807.690,00

1) Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah sebesar Rp24.289.186.800,00 merupakan tanah yang dimiliki Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2025. Nilai aset tanah bertambah sebesar Rp11.858.545.000,00 dari tahun 2024. Sedangkan tanah milik BPKPD sendiri masih sama dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp1.045.025.000.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 12.430.641.800
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp 0
Mutasi dari SKPD lain	Rp 156.545.000
Hibah dari Komite/Banprov/Banpus	Rp 11.702.000.000
Belum Tercatat	Rp 0
Koreksi tambah Aset	
Total Tambah	Rp11.858.545.000
Mutasi kurang:	Rp 0
Mutasi ke SKPD lain	Rp 0
penghapusan	Rp 0
Total kurang	
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 24.289.186.800

Tanah yang tercatat di Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen merupakan Tanah BPKPD dan Tanah PPKD, aset tanah secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Tanah BPKPD	Rp1.045.025.000	Rp0	Rp.0	Rp1.045.025.000
2	Tanah PPKD	Rp 11.385.616.800	Rp0	Rp11.858.545.000	Rp 23.244.161.800
	Jumlah	Rp 12.430.641.800	Rp0	Rp11.858.545.000	Rp 24.289.186.800

Adapun Tanah BPKPD senilai Rp1.045.025.000 terletak pada :

No	Lokasi	Kecamatan	Luas (m ²)	Nilai Perolehan
1	Jl. Pahlawan No.02 Kebumen	Kebumen	5.661 m ²	473.850.000
2	Jl. Indrakila No. 05 Kebumen	Kebumen	1.659 m ²	571.175.000
	Jumlah			1.045.025.000

2) Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp18.045.746.942,00 dan Rp17.160.156.621,00 Secara keseluruhan peralatan dan mesin BPKPD bertambah jika dibandingkan

pada periode yang sama pada tahun sebelumnya karena ada nilai pertambahan pada aset alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar dan komputer.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 17.160.156.621
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp 373.415.950
Mutasi dari SKPD lain	Rp 712.852.771
Belanja Barang Jasa menjadi Aset	Rp 35.495.988
Reklas/koreksi tambah Aset	Rp 10.500.000
Total tambah	Rp1.132.264.709
Mutasi kurang:	
Rusak Berat/ Usul Hapus	Rp 0
Mutasi antar SKPD	Rp 246.674.388
Hibah	Rp 0
Koreksi	Rp 0
Reklas (dari BM Intra ke Ekstra)	Rp 0
Total kurang	Rp 0
Saldo per 31 Desember 2025	Rp18.045.746.942

Adapun mutasi tambah sebesar Rp373.415.950 merupakan belanja modal alat angkutan, belanja modal alat kantor dan rumah tangga, alat studio kantor komunikasi dan pemancar dan belanja komputer pada tahun 2025. Mutasi tambah sebesar Rp712.852.771 merupakan mutasi antar SKPD berupa mutasi alat angkutan, alat besar dan alat kantor dan rumah tangga, sedangkan nilai mutasi Rp10.500.000 merupakan reklas tambah aset. Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp246.674.388 merupakan mutasi antar SKPD berupa alat angkutan dan komputer, sehingga nilai peralatan dan mesin pada akhir 2025 sebesar Rp18.045.746.942. rincian mutasi tambah peralatan dan mesin Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah

No	Nama Peralatan	Vol.	Satuan	Harga Perolehan	Ket.
1	Belanja Modal	44	Unit	373.415.950	
	Alat Angkutan	3	Unit	76.890.000	
	Alat Kantor dan Rumahtangga	20	Unit	84.270.855	
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	6	Unit	47.850.990	
	Komputer	15	Unit	164.404.105	
2	Belanja Barang Jasa Menjadi Aset	11	Unit	35.495.988,00	
	Komputer	11	Unit	35.495.988,00	
3	Mutasi Antar SKPD	25	Unit	712.852.771,00	
	Alat Besar	1	Unit	1.500.000,00	
	Alat Angkutan	24	Unit	703.852.771,00	
	Alat Kantor dan Rumahtangga	1	Unit	7.500.000,00	
4	Reklas Tambah	1	Unit	10.500.000	
	Reklas Tambah	1	Unit	10.500.000	

Sedangkan rincian mutasi kurang peralatan dan mesin Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2025 pada tabel berikut:

Mutasi Kurang

No	Nama Peralatan	Vol.	Satuan	Harga	Ket.
1	MUTASI ANTAR SKPD				
	Alat Angkutan	10	Unit	Rp211.178.400	
	Komputer	11	Unit	Rp 35.495.988	
Jumlah				Rp169.853.388	

Jumlah akhir aset Peralatan dan Mesin setelah mutasi tambah dan mutasi kurang dari saldo awal sebesar Rp17.160.156.621 menjadi Rp18.045.746.942 sebagaimana Mutasi berikut :

No	Jenis Barang	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Alat Besar	580.755.595	1.500.000	-	582.255.595
2	Alat Angkutan	9.225.927.503	791.242.771	211.178.400	9.805.991.874
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	28.000.000	-	-	28.000.000
4	Alat Kantor dan Rumah tangga	2.987.845.413	91.770.855	-	2.958.436.268
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	183.067.610	47.850.990	-	230.918.600
6	Alat Laboratorium	139.850.000	-	-	139.850.000
7	Komputer	3.956.113.028	199.900.093	35.495.988	4.241.697.133
8	Rambu-rambu	58.597.472	-	-	58.597.472
	Jumlah	17.160.156.621	1.132.264.709	246.674.388	18.045.746.942

3) Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan pada neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2025 sebesar Rp35.692.489.032, nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan nilai gedung dan bangunan pada akhir tahun 2024. Rincian pertambahan nilai gedung dan bangunan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 34.370.954.771
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp. 0
Mutasi dari SKPD lain	Rp. 1.321.534.261
Hibah Dari Komite/Banprop/Banpus	Rp. 0
Belanja barang/jasa menjadi aset	Rp. 0
Total Tambah	Rp. 1.321.534.261
Mutasi kurang:	
Penghapusan Aset	Rp. 0
Rusak Berat	Rp. 0
Mutasi ke SKPD Lain	Rp. 0

Reklas Aset (dari BM Intra ke Ekstra)	Rp. 0
Total Kurang	Rp. 0
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 35.692.489.032

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.692.489.032 terdiri dari gedung dan bangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di dua lokasi Jl. Pahlawan No.02 Kebumen dan Jl.Indrakila No.05 juga gedung bangunan dan milik PPKD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Gedung dan Bangunan BPKPD - Jl. Pahlawan N 02 - Jl. Indrakilla 05	7.380.433.310	362.354.200	0	7.742.787.510
2	Gedung dan Bangunan PPKD	26.990.521.461	959.180.061	0	27.949.701.522
Jumlah		34.370.954.771	1.321.534.261	0	35.692.489.032

Gedung dan bangunan milik BPKPD senilai Rp7.742.787.510 karena ada nilai tambah sebesar Rp362.354.200, nilai tambah tersebut merupakan pertambahan dari belanja barang jasa menjadi aset. Sedangkan nilai gedung dan bangunan milik PPKD bertambah nilai nya sebesar Rp959.180.061 karena mutasi antar SKPD dari gedung dan bangunan dari kecamatan Karangsambung yang berlokasi di Jl. Raya Karangsambung km 19, sehingga jumlah pertambahan nilai gedung dan bangunan menjadi Rp35.692.489.032. Aset gedung dan bangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Gedung/ Bangunan	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Jumlah Harga	Ket
	BPKPD				7.742.787.510	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1995	1705	M2	2.846.431.997	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2012	1357.28	M2	2.461.698.935	
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2019	274.87	M2	1.731.773.800	
4	Gedung Pos Jaga Permanen	2007	8	M2	25.340.000	
5	Gedung Pos Jaga Permanen	2009	8.6	M2	30.097.472	

No	Nama Gedung/ Bangunan	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Jumlah Harga	Ket
6	Gedung Pos Jaga Permanen	2014	4	M2	15.103.758	
7	Gedung Garasi/Pool Permanen	2010	49.8	M2	16.285.240	
8	Gedung Garasi/Pool Permanen	2012	108.3	M2	35.137.830	
9	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2014	67.5	M2	11.258.020	
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2014	81	M2	45.311.273	
11	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2015	319.9	M2	180.790.560	
12	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2015	23.48	M2	13.134.675	
13	Taman lainnya	2019	20	M2	116.288.025	
14	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	2019	56	M2	214.135.925	

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp760.978.268 dan Rp760.978.268

Saldo per 31 Desember 2023	Rp760.978.268
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp 0
Mutasi dari SKPD LAin	Rp 0
Koreksi Tambah/reklas aset	Rp 0
Total Tambah	
Mutasi kurang:	
Penghapusa Aset	Rp 0
Rusak Berat	Rp 0
Mutasi ke SKPD Lain	Rp 0
Koreksi/reklas aset	Rp 0
Total Kurang	
Saldo per 31 Desember 2024	Rp760.978.268

Nilai Aset Jaringan sebesar Rp 760.978.268 merupakan Jaringan yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen (BPKPD) dan PPKD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Jalan, Jaringan dan Irigasi (BPKPD)	616.502.268	-	-	616.502.268
	Jalan dan Jembatan	34.994.000			34.994.000
	Instalasi	1.912.600			1.912.600
	Jaringan	579.595.668			579.595.668
2	Jalan, Jaringan dan Irigasi (PPKD)	144.476.000			144.476.000
	Bangunan Air	141.550.000			141.550.000
	Jaringan	2.926.000			2.926.000
Jumlah		760.978.268	-	-	760.978.268

5) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada neraca per 31 desember 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar (Rp26.589.423.770) dan (Rp26.578.923.770) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2024 merupakan tahun ke-8 melakukan pelaporan keuangan dari kas basis ke akrual basis, sehingga tahun 2025 merupakan tahun ke-9 dalam melakukan penyusutan.

c. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp76.528.500 dan Rp183.793.500

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

1) Aset Tidak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp468.046.000 dan Rp 575.311.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik (software).

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 575.311.000
Mutasi tambah:	
Pembelian Software	0
Mutasi kurang:	
Penghapusan	Rp 107.265.000
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 468.046.000

2) Aset Lain-Lain/Aset Rusak Berat

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp157.131.320 dan Rp167.631.320 Nilai Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang kondisinya rusak berat ini . Adapun rincian aset lain-lain sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp167.631.320
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp0
Mutasi dari SKPD Lain	Rp0
Hasil Inventarisasi	Rp0
Total Tambah	Rp0
Mutasi kurang:	
Penghapusan Aset	Rp0
Reklas	Rp10.500.000
Total Kurang	Rp0
Saldo per 31 Desember 2025	Rp157.131.320

Aset Lain-Lain/Aset Rusak Berat tahun 2025 ada mutasi kurang sebesar Rp10.500.000 yang merupakan reklas peralatan dan mesin rusak berat, sehingga saldo aset lain-lain pada 31 desember 2025 sebesar Rp157.131.320.

2. Kewajiban

a) Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebesar Rp651.669.197,84 dan Rp913.229.805,97.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan diterima Dimuka	628.168.417,84	577.519.736,97
2	Utang Belanja	23.500.780,00	335.710.069,00
Jumlah		651.669.197,84	913.229.805,97

1) Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya, yang posisi per 31 Desember 2025 diterima SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan Diterima Dimuka
1	Pajak Reklame Permanen	381.166.210,87
2	Pajak Reklame Non Permanen	13.056.790,30
3	Pendapatan Diterima dimuka (Sewa)	233.945.416,67
JUMLAH		628.168.417,84

2) Utang Belanja

Utang Belanja merupakan belanja yang seharusnya dibayarkan tahun 2024 namun direalisasikan di tahun 2025. Utang Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2025 disajikan dalam table berikut:

No	Uraian	Jumlah Utang Belanja
1	Utang Belanja Pegawai	0
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	23.500.780
	Utang Belanja Jasa	23.500.780
JUMLAH		23.500.780

3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.831.379.511.199,38 dan Rp867.973.394.659,80.

D. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp867.973.394.659,80

2. Surplus/Defisit-LO Rp1.938.232.610.423,58

3. RK PPKD Rp23.698.867.672,00

4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Lain-lain Rp1.474.638.444,00

5. Jumlah Ekuitas Akhir Rp2.831.379.511.199,38



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025

BAB IV

PENJELASAN DAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen terletak di sebelah utara Alun-Alun Kabupaten Kebumen dan beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 02 Kebumen dan Jalan Indrakilla Nomor 05 Kebumen dengan alamat website <https://bpkpd.kebumenkab.go.id>.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok BPKPD Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
2. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;

4. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
5. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik Daerah;
6. pelaksanaan administrasi Badan;
7. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Badan; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Kebumen, diperlukan adanya pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar. BPKPD Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan pengelolaan keuangan OPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Dalam memenuhi tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang baik, maka BPKPD berdasarkan tupoksi yang diamanatkan telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, program dan kegiatan dan diselaraskan dengan RPJM Kabupaten tahun 2021-2026.

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Kebumen disusun dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mencapai sasaran - sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 maka strategi dan Kebijakan yang akan ditempuh oleh BPKPD sebagai berikut :

1. Kebijakan :

Peningkatan akuntabilitas system pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan

2. Strategi

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta kapasitas Keuangan dan Pendapatan daerah.
- b. Meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh satu Sekretaris dengan dua Kepala Sub Bagian, enam Kepala Bidang dengan dua belas Kepala Subbidang sebagai berikut:

I. Susunan Organisasi BPKPD Kabupaten Kebumen.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Sekretariat, membawahi:
 - 2.1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 3.1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - 3.2. Sub Bidang Perencanaan Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - 4.1. Sub Bidang Belanja;
 - 4.2. Sub Bidang Kas Daerah.
5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
 - 5.1. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - 5.2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
6. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
 - 6.1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah;
 - 6.2. Sub Bidang Analisa Dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
7. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
 - 7.1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah;
 - 7.2. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan BPKPD Tahun Anggaran 2025 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas SKPD sebagai sebuah entitas akuntansi/pelaporan.

Kebumen, 31 Desember 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740529 199303 1 001